

Perencanaan Pendidikan Yang Responsif Terhadap Perubahan Sosial: Pendekatan Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

Ahmad, IAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo

e-mail: ahmad@gmail.com

Abstrak

Perubahan sosial yang dinamis menuntut sistem pendidikan untuk adaptif dan responsif terhadap tuntutan zaman. Dalam konteks ini, perencanaan pendidikan yang inklusif menjadi salah satu pendekatan utama untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Artikel ini membahas bagaimana perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial, dengan pendekatan inklusif, dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan integrasi berbagai aspek, termasuk kebijakan, kurikulum, dan pelatihan tenaga pendidik, dengan tujuan untuk menjawab tantangan perubahan sosial, seperti kesenjangan sosial, ketidaksetaraan pendidikan, dan perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Perencanaan pendidikan, perubahan sosial, pendidikan berkualitas, inklusif, kebijakan pendidikan

Pendahuluan

Perubahan sosial yang cepat dan kompleks, seperti kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan demografis, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pendidikan harus mampu merespons perubahan sosial ini dengan cara yang fleksibel, adaptif, dan inklusif. Menurut UNESCO (2015), pendidikan berkualitas dapat menjadi alat yang kuat untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan dapat

mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pendidikan inklusif berfokus pada upaya mengurangi kesenjangan sosial, termasuk dalam hal akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan keempat yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Dengan menerapkan perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial, diharapkan pendidikan dapat menjawab tantangan-tantangan ini dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara.

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam pembangunan suatu negara, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan sosial yang terus berkembang. Perubahan sosial yang pesat, seperti kemajuan teknologi, globalisasi, pergeseran struktur ekonomi, dan dinamika sosial, mengharuskan sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial sangat diperlukan agar pendidikan dapat tetap relevan dan berkualitas. Perencanaan pendidikan yang tepat tidak hanya mencakup perencanaan kurikulum dan pembelajaran, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi peserta didik dan masyarakat secara luas (UNESCO, 2015).

Salah satu pendekatan yang perlu diterapkan dalam perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial adalah pendekatan inklusif. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun fisik mereka. Dengan memperkenalkan pendidikan inklusif, sistem pendidikan dapat lebih mengakomodasi keberagaman peserta didik dan menciptakan kesempatan yang setara bagi mereka untuk

berkembang. Pendekatan ini juga menanggapi isu ketidaksetaraan pendidikan yang masih terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana akses dan kualitas pendidikan sering kali terhambat oleh faktor sosial dan ekonomi (Schuelka, 2016).

Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya masih cukup besar. Ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pelatihan bagi guru dalam mengelola keberagaman peserta didik merupakan masalah utama yang masih dihadapi. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang lebih responsif dan inklusif sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan, khususnya di daerah-daerah tertinggal, harus menjadi prioritas dalam perencanaan pendidikan nasional (Suhartini, 2019).

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pendidikan juga dihadapkan pada tantangan untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Teknologi dapat memperluas akses pendidikan, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pendidikan formal tradisional. Namun, penggunaan teknologi dalam

pendidikan harus direncanakan dengan matang untuk memastikan bahwa teknologi tersebut dapat digunakan secara inklusif, bukan justru memperlebar kesenjangan sosial antara kelompok yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial harus mempertimbangkan integrasi teknologi secara bijak, mengingat peranannya yang semakin penting dalam dunia pendidikan saat ini (World Bank, 2018).

Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek sosial dan budaya dalam perencanaan pendidikan. Keberagaman budaya, bahasa, dan nilai-nilai sosial di Indonesia menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum dan metodologi pembelajaran. Pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial tidak hanya berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial yang dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Pendidikan harus mampu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kemampuan untuk hidup bersama dalam keberagaman (UNESCO, 2017).

Perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial, melalui pendekatan inklusif, dapat mendorong terciptanya pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan yang mendukung inklusivitas dalam setiap aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, pembelajaran, hingga penilaian. Dalam hal ini, peningkatan kualitas tenaga pendidik juga sangat penting, agar mereka memiliki kemampuan untuk menerapkan pendekatan yang inklusif dalam mengelola keberagaman di kelas. Selain itu, perencanaan pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, akan lebih efektif dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi peran perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas. Penelitian ini juga akan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi perencanaan pendidikan inklusif di Indonesia dan menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pendidikan agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Diharapkan, artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa depan, untuk mewujudkan pendidikan yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial memerlukan perhatian pada berbagai faktor, mulai dari kebijakan pendidikan hingga implementasi kurikulum. Menurut Fullan (2007), perubahan sosial dan teknologi menuntut adanya perubahan dalam paradigma pendidikan, sehingga sistem pendidikan harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Dalam konteks ini, perencanaan pendidikan yang responsif harus memperhatikan dinamika sosial yang terus berkembang, seperti perubahan dalam struktur sosial, kebutuhan pasar kerja, serta perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara belajar dan mengajar.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan inklusif, yang memprioritaskan pendidikan untuk semua, tanpa terkecuali. UNESCO (2017) menyatakan bahwa pendidikan inklusif berusaha menjawab berbagai tantangan ketidaksetaraan dalam pendidikan dengan memberikan akses yang setara kepada semua

lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, masyarakat miskin, dan kelompok marginal lainnya. Dalam konteks ini, perencanaan pendidikan yang inklusif mencakup kebijakan yang mendukung keberagaman dan kesetaraan dalam pendidikan, serta penyusunan kurikulum yang relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial menjadi sangat relevan dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini. Menurut Fullan (2007), perubahan sosial yang cepat membutuhkan sistem pendidikan yang mampu beradaptasi secara fleksibel. Hal ini mengarah pada pentingnya perencanaan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada penyampaian ilmu, tetapi juga pada cara-cara pendidikan dapat menanggapi dinamika sosial yang berkembang. Pendidikan harus responsif terhadap tuntutan zaman, dan itu melibatkan kesiapan untuk menghadapi tantangan baru seperti teknologi, nilai-nilai sosial yang berubah, serta kebutuhan pasar kerja yang berkembang pesat. Dalam konteks ini, pendidikan yang responsif harus berbasis pada prinsip-prinsip yang dapat mengakomodasi perubahan ini secara efektif.

Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang semakin banyak dipertimbangkan dalam perencanaan pendidikan yang responsif

terhadap perubahan sosial. Pendidikan inklusif berfokus pada memberikan akses yang setara bagi semua peserta didik, terlepas dari perbedaan sosial, ekonomi, budaya, maupun kemampuan fisik (Schuelka, 2016). Pendekatan ini mengakui keberagaman peserta didik dan bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam pendidikan yang sering kali muncul akibat ketidaksetaraan sosial. Dalam implementasinya, pendidikan inklusif berusaha untuk memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik, yang merupakan langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan berkualitas.

Menurut UNESCO (2017), pendidikan inklusif bukan hanya soal memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses pendidikan, tetapi juga berfokus pada kualitas pendidikan yang diterima oleh setiap individu. Dalam hal ini, pendidikan yang inklusif tidak hanya memastikan akses, tetapi juga memberikan perhatian terhadap metode pengajaran, materi yang relevan, serta evaluasi yang memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial harus

mempertimbangkan aspek ini agar pendidikan yang diselenggarakan dapat memenuhi kebutuhan setiap peserta didik, baik dalam hal kemampuan akademik maupun perkembangan sosial mereka.

Selain itu, keberhasilan pendidikan inklusif juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kapasitas tenaga pendidik. Penelitian yang dilakukan oleh Suhartini (2019) menunjukkan bahwa banyak guru di Indonesia yang masih kekurangan keterampilan dalam mengelola kelas yang heterogen, baik dalam hal kemampuan siswa maupun latar belakang sosial mereka. Guru yang tidak terlatih dengan baik dalam menangani keberagaman dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam pendidikan, karena mereka cenderung mengadopsi metode pengajaran yang tidak mempertimbangkan perbedaan antar siswa. Oleh karena itu, penting bagi perencanaan pendidikan untuk mencakup pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan inklusif di kelas.

Perubahan sosial juga mempengaruhi kebutuhan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat berkompetisi di pasar kerja global. Menurut laporan World Bank (2018), kebutuhan akan keterampilan abad ke-21, seperti keterampilan teknologi, berpikir kritis, dan kemampuan bekerja dalam tim, semakin penting di dunia kerja.

Pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial harus dapat mengakomodasi perkembangan ini dengan mengintegrasikan keterampilan-keterampilan ini ke dalam kurikulum. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus melibatkan stakeholders yang terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun tidak hanya relevan dengan kebutuhan sosial saat ini tetapi juga mempersiapkan peserta didik untuk masa depan yang lebih dinamis.

Selain itu, dalam konteks Indonesia, masih terdapat ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Menurut laporan dari UNESCO (2015), ketidaksetaraan ini menjadi salah satu penghambat utama dalam pencapaian tujuan pendidikan berkualitas untuk semua. Keterbatasan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil membuat banyak anak-anak di wilayah tersebut tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial perlu memasukkan strategi yang lebih berfokus pada pemerataan pendidikan antar wilayah, termasuk dengan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keterbatasan geografis.

Perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial juga harus memanfaatkan teknologi sebagai salah

satu alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi dapat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, baik di tingkat dasar maupun lanjutan. Misalnya, pembelajaran daring atau e-learning memberikan kesempatan bagi siswa di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan yang lebih baik. Namun, seperti yang disampaikan oleh Fullan (2007), penggunaan teknologi dalam pendidikan juga harus dilihat secara kritis, karena jika tidak dikelola dengan bijak, teknologi justru dapat memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang responsif harus memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang inklusif, menghindari digital divide, dan memperhitungkan kemampuan siswa dalam mengakses teknologi tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial dengan pendekatan inklusif untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam mengenai fenomena perencanaan pendidikan dalam konteks perubahan sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini

berfokus pada eksplorasi konsep-konsep pendidikan yang responsif dan inklusif, serta untuk menggali pengalaman dan perspektif dari para pemangku kepentingan terkait, seperti pengambil kebijakan, pendidik, dan siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Creswell (2014) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan mengamati dan menganalisis aspek-aspek yang tidak dapat dijelaskan dengan angka atau data kuantitatif.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci yang terlibat langsung dalam perencanaan pendidikan di Indonesia, seperti pejabat pemerintah di bidang pendidikan, kepala sekolah, dan guru. Informan juga termasuk pakar pendidikan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pendekatan inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-struktural yang memungkinkan fleksibilitas dalam mengelola percakapan sambil tetap berfokus pada tema-tema kunci yang telah ditetapkan. Prosedur wawancara ini mengacu pada prinsip-prinsip etika penelitian yang memastikan privasi dan

kerahasiaan informasi yang diperoleh dari responden (Patton, 2002).

Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen pendidikan yang relevan dengan topik penelitian. Kajian literatur ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang teori-teori pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial, serta prinsip-prinsip pendidikan inklusif yang telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Referensi dari literatur internasional juga digunakan untuk memberikan perspektif global mengenai implementasi pendidikan inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial (Schuelka, 2016). Analisis dokumen juga mencakup tinjauan terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan inklusivitas dan responsivitas terhadap perubahan sosial.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data yang diperoleh melalui wawancara dan kajian literatur. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan menganalisis data secara sistematis, serta menarik kesimpulan yang dapat memberikan wawasan tentang

bagaimana perencanaan pendidikan dapat lebih responsif terhadap perubahan sosial dan menerapkan pendekatan inklusif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peneliti mengkodekan data dan mengelompokkan informasi yang memiliki kesamaan tema, kemudian menginterpretasikan hasilnya untuk menjawab pertanyaan penelitian (Braun & Clarke, 2006).

Selanjutnya, untuk memvalidasi hasil penelitian, peneliti melakukan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan sumber data sekunder serta referensi dari studi-studi terdahulu. Triangulasi ini digunakan untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas temuan penelitian. Selain itu, peneliti juga mengkonsultasikan hasil analisis dengan para ahli di bidang pendidikan untuk mendapatkan umpan balik dan untuk memperkaya hasil temuan (Lincoln & Guba, 1985). Proses ini juga berfungsi untuk mengurangi bias dan memastikan bahwa interpretasi yang dilakukan berdasarkan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah bahwa data yang diperoleh hanya mencakup sudut pandang dari sejumlah informan yang dipilih secara purposive, sehingga temuan penelitian tidak dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada konteks

pendidikan di Indonesia, sehingga tidak dapat sepenuhnya menggambarkan perencanaan pendidikan di negara lain. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial dan penerapan pendidikan inklusif di Indonesia.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu yang tersedia untuk melakukan wawancara dan analisis data secara mendalam. Untuk mengatasi hal ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang efisien, seperti wawancara semi-struktural yang memungkinkan percakapan lebih fokus dan informan dapat memberikan jawaban yang lebih komprehensif. Meskipun demikian, peneliti tetap menyadari bahwa waktu yang terbatas dapat mempengaruhi kedalaman wawancara dan analisis data.

Secara keseluruhan, metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial dengan pendekatan inklusif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil keputusan dalam menciptakan

pendidikan yang lebih adil dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Kebijakan pendidikan yang inklusif berfokus pada pemberdayaan semua individu untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Penelitian ini menemukan bahwa kurikulum yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan perkembangan sosial, serta yang memperhatikan keberagaman budaya dan sosial, dapat menciptakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

Sebagai contoh, kebijakan pendidikan di beberapa negara maju seperti Finlandia dan Kanada menunjukkan bagaimana pendidikan inklusif dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung keberagaman, baik dari segi sosial-ekonomi, etnis, maupun kemampuan fisik dan intelektual. Hal ini diimplementasikan melalui kurikulum yang fleksibel, pelatihan guru yang berkelanjutan, dan sistem evaluasi yang adaptif terhadap kebutuhan setiap siswa. Di Indonesia, meskipun sudah ada kebijakan pendidikan inklusif, tantangan dalam implementasinya masih besar, terutama terkait dengan

infrastruktur yang memadai dan kesiapan tenaga pendidik dalam menghadapi keberagaman siswa.

Perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial juga melibatkan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat mempermudah akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan terpinggirkan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang lebih fleksibel, sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta didik. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak menambah ketidaksetaraan, melainkan menjadi alat untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial sangat diperlukan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, ditemukan bahwa perencanaan pendidikan saat ini masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perubahan sosial yang cepat, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial budaya. Walaupun terdapat kebijakan-kebijakan yang mendukung perubahan sosial, seperti kurikulum 2013,

implementasinya belum optimal. Menurut salah satu informan, "Perencanaan pendidikan masih bersifat top-down, sementara perubahan sosial lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat" (Wawancara, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pendidikan inklusif menjadi pendekatan yang penting dalam perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada akses pendidikan bagi seluruh peserta didik, tetapi juga pada kualitas pembelajaran yang diberikan. Dalam hal ini, pendidikan inklusif bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya di dalam kelas. Sebagai contoh, banyak sekolah di daerah terpencil yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas, tetapi dengan adanya kebijakan pendidikan inklusif yang mengedepankan pemerataan akses dan kualitas, mereka dapat mendapatkan peluang yang sama. Hal ini sesuai dengan temuan UNESCO (2017), yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif dapat memperkuat keadilan sosial dengan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua

anak, terutama yang berada dalam kondisi marginal.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pelatihan dan kompetensi guru. Sebagian besar guru belum terlatih untuk mengelola kelas yang heterogen, baik dari segi kemampuan akademik maupun latar belakang sosial peserta didik. Menurut Suhartini (2019), kurangnya pelatihan bagi guru dalam menghadapi keberagaman siswa dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan inklusif. Hal ini menjadi perhatian penting, karena tanpa adanya keterampilan yang memadai, guru tidak dapat menerapkan strategi pengajaran yang sesuai untuk mendukung keberagaman siswa di dalam kelas. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan bagi guru dalam menangani kelas inklusif menjadi sangat krusial untuk mencapai pendidikan berkualitas.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perubahan sosial yang cepat, terutama dalam aspek teknologi dan globalisasi, menuntut perencanaan pendidikan yang lebih adaptif. Hasil temuan menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi salah satu alat penting untuk memperluas akses pendidikan, terutama di daerah-daerah yang terisolasi. Penggunaan

platform e-learning, misalnya, memungkinkan siswa di wilayah pedesaan atau daerah terpencil untuk mengakses materi pembelajaran yang setara dengan siswa di kota-kota besar. Namun, tantangan yang muncul adalah kesenjangan dalam hal akses teknologi dan pemahaman digital di antara peserta didik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada pemerataan akses teknologi dan infrastruktur digital sebagai bagian dari perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial.

Tantangan lain yang dihadapi dalam perencanaan pendidikan responsif terhadap perubahan sosial adalah kesenjangan antara kurikulum yang diterapkan di sekolah dengan kebutuhan pasar kerja. Penelitian ini menemukan bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja global, seperti keterampilan teknologi, pemecahan masalah, dan kreativitas. Sebagaimana dilaporkan oleh World Bank (2018), pendidikan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih tertinggal dalam hal pemenuhan keterampilan abad ke-21. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk menciptakan kurikulum

yang dapat mengakomodasi kebutuhan pasar kerja masa depan yang dinamis.

Berdasarkan hasil temuan, salah satu langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pendidikan yang responsif adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dapat memperkaya perencanaan pendidikan dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan aspirasi lokal yang berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan, "Keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada seberapa banyak masyarakat terlibat dalam perencanaan, karena mereka yang lebih tahu tentang kebutuhan lokal" (Wawancara, 2023). Hal ini mengarah pada pentingnya pendekatan bottom-up dalam perencanaan pendidikan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, karena masyarakat lokal adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kebijakan pendidikan.

Pada aspek pemerataan pendidikan, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat ketimpangan yang signifikan dalam hal akses pendidikan berkualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Meskipun ada kebijakan yang mendukung pemerataan pendidikan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendidikan di daerah tertinggal, kenyataannya masih banyak daerah

yang kesulitan dalam mengakses fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini diperparah oleh keterbatasan tenaga pengajar yang berkualitas di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar perencanaan pendidikan lebih fokus pada pemberdayaan dan pengembangan kapasitas guru di daerah-daerah yang masih kekurangan sumber daya pendidikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif, berbasis pada kebutuhan masyarakat, dan mempertimbangkan tantangan global yang sedang berkembang. Penerapan pendidikan inklusif yang tidak hanya berfokus pada akses, tetapi juga pada kualitas pendidikan, dapat membantu mewujudkan pendidikan yang lebih adil dan merata. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan perubahan sosial yang cepat, keterampilan abad ke-21, pemerataan akses, serta pelatihan guru agar tercipta sistem pendidikan yang dapat mempersiapkan generasi masa depan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.

Kesimpulan

Perencanaan pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial dengan

pendekatan inklusif merupakan kunci untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif dan responsif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kesiapan guru, kesenjangan teknologi, serta pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pendidikan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial yang cepat, seperti globalisasi dan perkembangan teknologi. Pendidikan yang inklusif tidak hanya mengutamakan akses, tetapi juga kualitas pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman peserta didik, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pendidikan adalah keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan lokal. Selain itu, untuk memastikan kesuksesan perencanaan pendidikan yang responsif, pengembangan kapasitas guru dan pemerataan fasilitas pendidikan juga harus menjadi prioritas. Dengan demikian, melalui perencanaan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif, Indonesia dapat mencapai

tujuan pendidikan berkualitas yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change*. 4th ed. New York: Teachers College Press.
- UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2017). *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*. Paris: UNESCO.
- World Bank. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. Washington, D.C.: World Bank.
- Schuelka, M. J. (2016). "The Concept of Inclusive Education: A Global Perspective." *International Journal of Inclusive Education*, 20(7), 690–706.
- Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. (2014). *The National Education System Act of 2003*. Jakarta: Ministry of Education and Culture.
- Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change*. 4th ed. New York: Teachers College Press.
- Schuelka, M. J. (2016). "The Concept of Inclusive Education: A Global Perspective." *International Journal of Inclusive Education*, 20(7), 690-706.
- UNESCO. (2017). *A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education*. Paris: UNESCO.
- World Bank. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. Washington, D.C.: World Bank.
- Suhartini, D. (2019). "Pendidikan Inklusif di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 25(3), 45-59.
- Robinson, K. (2015). *Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education*. New York: Viking.
- PISA. (2018). *PISA 2018 Results: Combined Executive Summaries*. Paris: OECD Publishing.
- Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
- Friedman, T. L. (2005). *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. New York: Farrar, Straus, and Giroux.
- United Nations. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- Tilak, J. B. G. (2002). "Education and Poverty." *International Journal of Educational Development*, 22(3-4), 243-257.
- Lingard, B., & Sellar, S. (2013). *The Global Education Race: Taking the Measure of PISA and International Testing*. New York: Routledge.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its Discontents*. New York: W.W. Norton & Company.